



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018**

PUSAT PERUMUSAN STANDAR

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Merujuk Renstra Pusat Perumusan Standar (PPS) tahun 2015-2019, maka untuk mewujudkan sasaran: tersedianya RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengembangan standar, maka PPS menetapkan 5 (lima) kegiatan utama yang terdiri dari:

1. Perumusan kebijakan pengembangan standar
2. Pengendalian proses perumusan SNI hingga RASNI siap ditetapkan
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia Perumusan SNI
4. Peningkatan Kinerja Komtek/Sub Komtek
5. Fasilitasi Perumusan SNI dan Kaji Ulang SNI

Secara umum, kinerja unit PPS di tahun 2018 telah menunjukkan hasil yang memuaskan karena telah mampu memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2018 dari Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PPS dalam Renstra PPS tahun 2015-2019, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2018 Pusat Perumusan Standar. Prosentase tingkat capaian yang diraih pada tahun 2018 adalah:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Stakeholder Perspectives					
1) Meningkatnya pengelolaan standardisasi	1. Jumlah SNI yang ditetapkan	SNI	10.059	10.069	100,09 %
Internal Process Perspectives					
2) Meningkatkan kebijakan dalam perumusan standar	2. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dari Komite Teknis Perumusan SNI	Rekomendasi	750	930	124 %
	3. Jumlah rancangan pedoman terkait pengembangan SNI	Rancangan	2	2	100 %
	4. Jumlah SNI yang dikaji ulang	SNI	400	680	170 %
3) Meningkatkan pengelolaan kualitas SDM dalam perumusan standar	5. Jumlah sumber daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	Orang	550	802	133 %
	6. Jumlah Komtek yang memenuhi	Komtek	40	26	65 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	kriteria evaluasi kinerja				
4) Meningkatkan pengelolaan layanan dalam penetapan SNI	7. % penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu	%	25	23.38	93.52 %
	8. Jumlah kumulatif Sekretariat Komtek Perumusan SNI yang dikelola oleh BSN	Sekretariat	38	37	97.36 %
5) Meningkatkan harmonisasi RSNI dengan standar internasional	9. Jumlah RSNI adopsi standar internasional	RSNI	186	229	123%
Learning and Growth Perspectives					
6) Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di PPS	10. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)	nilai	83	87,22	105,08 %
	11. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)	nilai	70	73,43	104,90 %
7) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di PPS	12. % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	%	100	100	100%
8) Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di PPS	13. % Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN	%	100%	100	100%
	14. % Pemanfaatan BMN	%	100	100	100%
9) Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di PPS	15. % Realisasi Anggaran	%	≥95	98.03	103,19%

Sementara itu terkait pagu anggaran PPS tahun 2018 dan realisasinya, maka PPS mendapatkan pagu anggaran awal sebesar Rp. 10.840.128.000,- yang kemudian direvisi karena adanya pengalihan program prioritas BSN, menjadi Rp 8.425.550.105, yang digunakan untuk membiayai 5 (lima) kegiatan utama yang ada, dengan hasil capaian penyerapan anggaran pada tahun 2018 adalah sebesar 98,03 %.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, maka laporan ini disusun oleh Pusat Perumusan Standar (PPS) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait, khususnya kepada lembaga pembina Badan Standardisasi Nasional yang merupakan instansi induk dari PPS.

Tak lupa kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas hidayah dan tuntunan yang telah diberikan kepada kami beserta seluruh staf di lingkungan PPS, sehingga pencapaian kinerja unit kerja PPS tahun 2018 dan penyusunan laporan ini dapat terwujud dengan baik.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan PPS sepanjang tahun 2018 pada umumnya dan dalam penyusunan laporan ini, masih jauh dari sempurna sebagaimana diharapkan oleh banyak pihak. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan perbaikan dan kritik yang membangun untuk tercapainya hasil yang lebih sempurna di waktu yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami bahwa laporan ini akan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para pembaca dan pengguna dokumen ini dalam penyediaan informasi yang terkait dengan kegiatan pengembangan SNI.

Jakarta, 22 Januari 2019
Kepala Pusat Perumusan Standar



Hendro Kusumo
NIP 19690219 199703 1 001

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
SASARAN 1 Meningkatkan Pengelolaan Standardisasi.....	15
SASARAN 2 Meningkatkan Kebijakan Dalam Perumusan Standar.....	19
SASARAN 3 Meningkatkan Pengelolaan Kualitas SDM Dalam Perumusan Standar.....	26
SASARAN 4 Meningkatkan Pengelolaan Layanan Dalam Penetapan SNI	36
SASARAN 5 Meningkatkan Harmonisasi RSNI Dengan Standar Internasional....	40
SASARAN 6 Meningkatkan Tata Kelola Dan Organisasi Yang Profesional Di PPS	41
SASARAN 7 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di PPS.....	42
SASARAN 8 Meningkatkan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Kinerja Di PPS.....	45
SASARAN 9 Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Anggaran Di PPS	46
BAB IV PENUTUP.....	50
LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 - Personel ASN Pusat Perumusan Standar	4
Tabel I.2 - Potensi dan Permasalahan Kepala Pusat Perumusan Standar.....	5
Tabel II.1 - Perjanjian Kinerja Pusat Perumusan Standar Tahun 2018	9
Tabel III.1 - Pencapaian Kinerja Pusat Perumusan Standar Tahun 2018.....	13
Tabel III. 2 - Capaian Kinerja Sasaran I	15
Tabel III.3– Distribusi Jumlah SNI yang ditetapkan per bidang.....	15
Tabel III.4– Jumlah SNI yang telah ditetapkan di tahun 2018 menurut jenis PNPS	16
Tabel III.5 – Jumlah SNI yang telah ditetapkan di tahun 2018 menurut jalur pengembangan.....	17
Tabel III.6 – SNI menurut kelompok peruntukkan yang telah ditetapkan di tahun 2018	17
Tabel III.7 – Jumlah SNI yang telah diabolisi di tahun 2018	18
Tabel III.8 - Capaian Kinerja Sasaran II	19
Tabel III.9 – Distribusi jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)	210
Tabel III.10 – Distribusi rekomendasi persetujuan usulan PNPS berdasarkan jalur usulan.....	21
Tabel III.11 - Jumlah SNI Kaji Ulang Tahun 2018	26
Tabel III.12 - Capaian Kinerja Sasaran III	26
Tabel III.13 - Pembinaan SDM Perumusan SNI tahun 2018	27
Tabel III.14 – Kriteria evaluasi kinerja komite teknis perumusan SNI tahun 2018	32
Tabel III.15 - Hasil scoring pelaksanaan evaluasi kinerja Komtek/Sub Komtek tahun 2018	32
Tabel III.16 - Hasil scoring Komtek/Sub Komtek tahun 2018 > 40 %	33
Tabel III.18 - Persentase Penyelesaian PNPS hingga RASNI Tepat Waktu	37

Tabel III.19 – Pengelolaan sekretariat Komtek di PPS - BSN.....	38
Tabel III.20 – Sekretariat Komtek/SubKomtek Perumusan SNI yang dikelola oleh PPS	39
Tabel III.21 - Capaian Kinerja Sasaran IV	40
Tabel III.22 - Target dan realisasi jumlah RSNI adopsi standar internasional.....	41
Tabel III.23 - Capaian Kinerja Sasaran VI	41
Tabel III.24 - Capaian Kinerja Sasaran VII.....	42
Tabel III.25 - Pelatihan dan training peningkatan kompetensi ASN di PPS	43
Tabel III.26 - Capaian Kinerja Sasaran VIII.....	47
Tabel III.27 - Capaian Kinerja Sasaran IX.....	47
Tabel III.28 - Realisasi Anggaran PPS tahun 2017 berdasarkan output anggaran	47
Tabel III.29 - Realisasi Anggaran PPS tahun 2018 berdasarkan output anggaran	47
Tabel III.30 - Perbandingan Realisasi Anggaran PPS di tahun 2017 dan 2018.....	48
Tabel III.31 - Pagu dan Realisasi Anggaran	48
Tabel IV.1 - Pencapaian Kinerja Pusat Perumusan Standar Tahun 2018.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 - Struktur Organisasi Pusat Perumusan Standar.....	3
Gambar I.2 - Grafik Personel ASN Pusat Perumusan Standar	4
Gambar III.1 – Jumlah SNI yang telah ditetapkan di tahun 2018	16
Gambar III.2– Jumlah SNI yang telah ditetapkan di tahun 2018 menurut jenis PNPS	16
Gambar III.3– Jumlah SNI menurut jenis PNPS yang telah ditetapkan di tahun 2018	17
Gambar III.4– SNI menurut kelompok peruntukkan yang telah ditetapkan di tahun 2018	17
Gambar III.5 – Kegiatan rapat teknis perumusan SNI	18
Gambar III.6 - Jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dari Komite Teknis Perumusan SNI	20
Gambar III.7 Jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dari Komite Teknis Perumusan SNI	21
Gambar III.8 – Target dan Realisasi SNI kaji ulang dari tahun 2015 - 2018.....	25
Gambar III.9 – Pencapaian target jumlah komite teknis/subkomite teknis yang memenuhi kriteria evaluasi kinerja Tahun 2017 - 2018	35
Gambar III.10– Penerima penghargaan herudi technical committee award 2018 untuk Komite Teknis/Subkomite Teknis yang meraih nilai tertinggi dalam evaluasi kinerja 2018.....	36
Gambar III.11 - Pengelolaan sekretariat Komtek di PPS – BSN.....	38

DAFTAR SINGKATAN

SNI	=	Standar Nasional Indonesia
PPK	=	Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan
MEK	=	Bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi
LS	=	Bidang Lingkungan dan Serbaneka
KP	=	Bidang Kimia dan Pertambangan

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi*. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Pusat Perumusan Standar, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional*.

Kinerja Pusat Perumusan Standar memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Pusat Perumusan Standar merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi tahun 2018.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Perumusan Standar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang *Organisasi dan Tata Kerja BSN* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang *organisasi dan tata kerja BSN*, tugas Pusat Perumusan Standar adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun international.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Pusat Perumusan Standar menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan rumusan kebijakan di bidang perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;
2. pembinaan dan pengembangan sistem perumusan Standar Nasional Indonesia
3. perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia
4. pelaksanaan evaluasi perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia

Struktur Pusat Perumusan Standar dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1 - Struktur Organisasi Pusat Perumusan Standar

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Pusat Perumusan Standar mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan (PPK), dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program, dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang pertanian, pangan dan kesehatan.
2. Bidang Kimia dan Pertambangan (KP), dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang kimia dan pertambangan.
3. Bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi (MEK), dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang mekanika, elektroteknika, dan konstruksi.
4. Bidang Lingkungan dan Serbaneka (LS), dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi

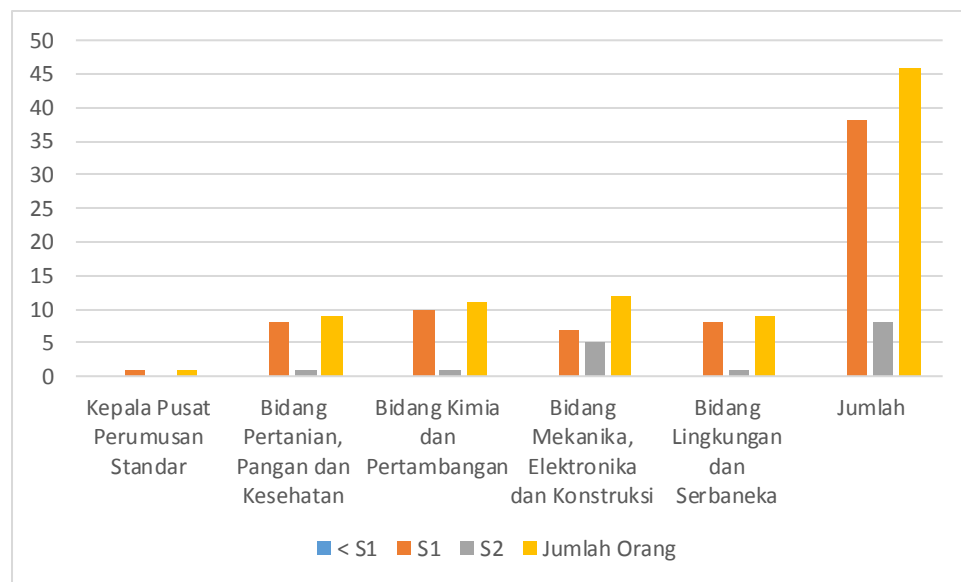
standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang lingkungan dan serbaneka.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2018 Pusat Perumusan Standar memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak empat puluh enam (46) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1 - Personel ASN Pusat Perumusan Standar

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	
1.	Kepala Pusat Perumusan Standar	-	1	-	1
2.	Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan		8	1	9
3.	Bidang Kimia dan Pertambangan	-	10	1	11
4.	Bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi	-	7	5	12
5.	Bidang Lingkungan dan Serbaneka	-	8	1	9
Jumlah		-	38	8	46



Gambar I.2 - Grafik Personel ASN Pusat Perumusan Standar

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Pusat Perumusan Standar mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu untuk menjamin bahwa dalam pengembangan SNI, seluruh Komite Teknis/Sub Komite Teknis (Komtek/SubKomtek) dan para pemangku kepentingan yang terkait senantiasa taat azas dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN). Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pusat Perumusan Standar telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2 - Potensi dan Permasalahan Kepala Pusat Perumusan Standar

NO	POTENSI	NO	PERMASALAHAN	NO	TINDAK LANJUT
1	SNI yang ditetapkan memenuhi ketentuan PERKA BSN terkait Pengembangan SNI	1	Adanya sejumlah SNI yang ditetapkan belum memenuhi ketentuan PERKA BSN terkait Pengembangan SNI	1	SNI yang ditetapkan didorong untuk memenuhi ketentuan PERKA BSN terkait Pengembangan SNI
2	SNI dapat mendukung produk unggulan Nasional untuk meningkatkan daya saingnya	2	SNI yang ditetapkan belum mendukung produk unggulan untuk meningkatkan daya saingnya	2	Pengembangan SNI diarahkan untuk mendukung produk unggulan Nasional
3	SNI dapat menjamin mutu produk yang beredar dipasar retail	3	Produk retail yang beredar dipasar belum banyak yang ber SNI	3	Pengembangan SNI untuk memfasilitasi kebutuhan produk yang beredar dipasar retail
4	SNI dibutuhkan sebagai referensi oleh industri/organisasi	4	Beberapa SNI yang ditetapkan belum diterapkan oleh industri/organisasi	4	Pengembangan SNI untuk memfasilitasi kebutuhan industri/organisasi

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi



umusan visi dan misi Pusat Perumusan Standar sesuai Renstra Pusat Perumusan Standar Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

Terwujudnya proses Perumusan SNI yang taat azas dan tepat waktu

MISI

1. Mengembangkan dan memperkuat sistem pengembangan SNI
2. Menyempurnakan kebijakan pengembangan SNI
3. Melaksanakan pengelolaan komtek/subkomtek pengembangan SNI
4. Melaksanakan pembinaan komtek/subkomtek dan personel terkait dengan pengembangan SNI
5. Memfasilitasi proses pengembangan SNI secara taat azas

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Pusat Perumusan Standar telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Pusat Perumusan Standar yaitu “Jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan”

TUJUAN

Jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan

Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Pusat Perumusan Standar selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Pusat Perumusan Standar dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Pusat Perumusan Standar harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2018, sasaran Pusat Perumusan Standar telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Pusat Perumusan Standar Tahun 2015-2019 yaitu tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Pusat Perumusan Standar berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan standardisasi
2. Meningkatkan kebijakan dalam perumusan standar
3. Meningkatkan pengelolaan kualitas SDM dalam perumusan standar
4. Meningkatkan pengelolaan layanan dalam penetapan SNI
5. Meningkatkan harmonisasi RSNI dengan standar internasional
6. Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di PPS

7. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di PPS
8. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di PPS
9. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di PPS

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Pusat Perumusan Standar sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Pusat Perumusan Standar Tahun 2018 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusat Perumusan Standar tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1 - Perjanjian Kinerja Pusat Perumusan Standar Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Stakeholder Perspectives			
1) Meningkatnya pengelolaan standardisasi	1. Jumlah SNI yang ditetapkan	SNI	10059
Internal Process Perspectives			
2) Meningkatkan kebijakan dalam perumusan standar	2. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dari Komite Teknis Perumusan SNI	Rekomendasi	750
	3. Jumlah rancangan pedoman terkait pengembangan SNI	Rancangan	2
	4. Jumlah SNI yang dikaji ulang	SNI	400
3) Meningkatkan pengelolaan kualitas SDM dalam perumusan standar	5. Jumlah Sumber Daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	Orang	550
	6. Jumlah Komtek yang memenuhi kriteria evaluasi kinerja	Komtek	40
4) Meningkatkan pengelolaan layanan dalam penetapan SNI	7. % penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu	%	25
	8. Jumlah kumulatif Sekretariat Komtek Perumusan SNI yang dikelola oleh BSN	Sekretariat	38
5) Meningkatkan harmonisasi RSNI dengan standar internasional	9. Jumlah RSNI adopsi standar internasional	RSNI	186
Learning and Growth Perspectives			
6) Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang	10. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)	nilai	83
	11. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	nilai	70

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
profesional di PPS	(Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)		
7) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di PPS	12. % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	%	100
8) Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di PPS	13. % Ketersediaan serana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN	%	100
	14. % Pemanfaatan BMN	%	100
9) Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di PPS	15. % Realisasi Anggaran	%	≥95%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pusat Perumusan Standar pada tahun 2017 menetapkan sebanyak 9 (sembilan) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pusat Perumusan Standar melaksanakan kegiatan perumusan standar dalam Program Pengembangan Standardisasi Nasional. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui:

Kegiatan: Perumusan Standar, yang akan menghasilkan output 500 SNI

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Perumusan Standar Nasional Indonesia

2. Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi
3. Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Lingkungan dan Serbaneka
4. Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Kimia dan Pertambangan
5. Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan



kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Pusat Perumusan Standar berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Pusat Perumusan Standar telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Pusat Perumusan Standar Tahun 2018.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Perumusan Standar, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Pusat Perumusan Standar yang direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1 - Pencapaian Kinerja Pusat Perumusan Standar Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Stakeholder Perspectives					
1) Meningkatnya pengelolaan standarisasi	1. Jumlah SNI yang ditetapkan	SNI	10.059	10.069 SNI	100,09%
Internal Process Perspectives					
2) Meningkatkan kebijakan dalam perumusan standar	2. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dari Komite Teknis Perumusan SNI	Rekomendasi	750	930	124 %
	3. Jumlah rancangan pedoman terkait pengembangan SNI	Rancangan	2	2	100 %
	4. Jumlah SNI yang dikaji ulang	SNI	400	680	170 %
3) Meningkatkan pengelolaan kualitas SDM dalam perumusan standar	5. Jumlah Sumber Daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	Orang	550	802	133%
	6. Jumlah Komtek yang memenuhi kriteria evaluasi kinerja	Komtek	40	26	65%
4) Meningkatkan pengelolaan layanan dalam penetapan SNI	7. % penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu	%	25%	23.38%	93.52%
	8. Jumlah kumulatif Sekretariat Komtek Perumusan SNI yang dikelola oleh BSN	Sekretariat	38	37	97.36 %
5) Meningkatkan harmonisasi RSNI dengan standar internasional	9. Jumlah RSNI adopsi standar internasional	RSNI	186	229	123 %
Learning and Growth Perspectives					
6) Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang	10. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)	nilai	83	87,22	105,08%

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
profesional di PPS.	11. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)	nilai	70	73,43	104,90%
7) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di PPS	12. % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	%	100%	100%	100%
8) Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di PPS	13. % Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN	%	100%	100%	100%
	14. % Pemanfaatan BMN	%	100%	100%	100%
9) Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di PPS	15. % Realisasi Anggaran	%	≥95	98,03%	103,19%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Pusat Perumusan Standar untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 1 Meningkatnya pengelolaan standarisasi

Tabel III. 2 - Capaian Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian %		
1. Jumlah SNI yang ditetapkan	10.059 SNI	10.069 SNI	100,09%	N/A	Tahun 2017 tidak terdapat indikator kumulatif jumlah SNI

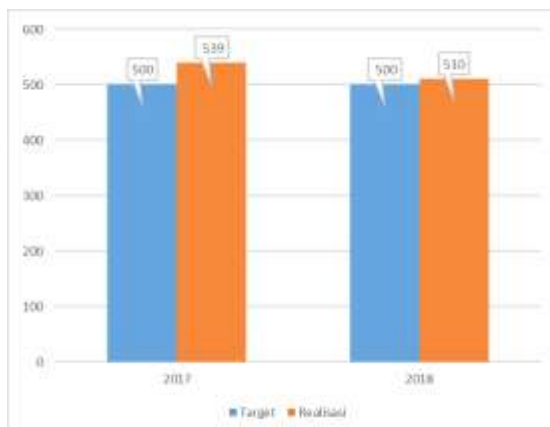
1. Indikator Kinerja: Jumlah SNI yang ditetapkan

Memperhatikan sasaran tahunan, indikator dan target Pusat Perumusan Standar yang ditetapkan pada tahun 2018, telah ditetapkan sebanyak 510 SNI.

Perbandingan target dan realisasi untuk setiap bidang pada tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada Gambar III, sedangkan distribusi jumlah SNI yang ditetapkan untuk tiap bidang dapat dilihat pada Tabel III berikut :

Tabel III.3 – Distribusi Jumlah SNI yang ditetapkan per bidang

Bidang	2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
KP	125	130	100	126
PPK	125	133	140	160
LS	125	145	125	125
MEK	125	131	135	99
Total	500	539	500	510

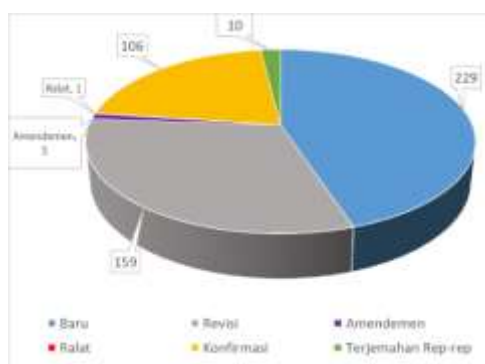


Gambar III.1 – Jumlah SNI yang telah ditetapkan di tahun 2018

Dari keseluruhan 510 SNI yang ditetapkan pada tahun 2018, dapat dijabarkan dalam beberapa kategori sebagaimana dapat dilihat pada Tabel III.4 dan Gambar III.2 berikut:

Tabel III.4 – Jumlah SNI yang telah ditetapkan di tahun 2018 menurut jenis PNPS

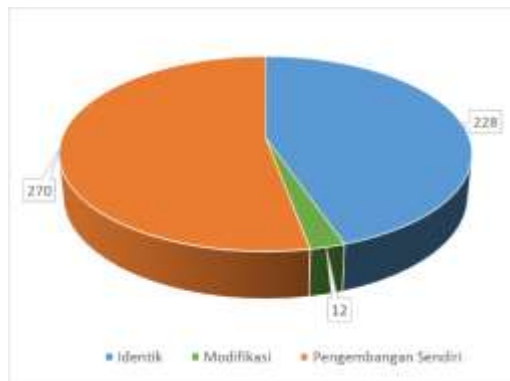
Jenis PNPS	Bidang				PPS
	KP	PPK	LS	MEK	Total
Baru	42	85	44	58	229
Revisi	29	75	20	35	159
Amendemen	0	0	2	3	5
Ralat	1	0	0	0	1
Konfirmasi	54	0	49	3	106
Terjemahan Rep-rep	0	0	10	0	10
Total	126	160	125	99	510



Gambar III.2 – Jumlah SNI yang telah ditetapkan di tahun 2018 menurut jenis PNPS

Tabel III.5 – Jumlah SNI yang telah ditetapkan di tahun 2018 menurut jalur pengembangan

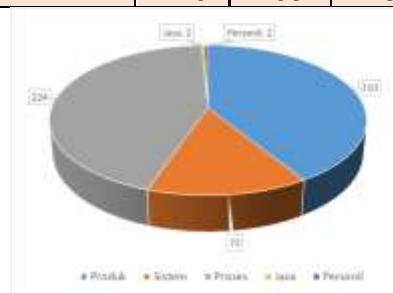
Kategori	Bidang				PPS
	KP	PPK	LS	MEK	Total
Adopsi identik	50	25	90	63	228
Adopsi modifikasi	9	0	0	3	12
Pengembangan Sendiri	67	135	35	33	270
Total	126	160	125	99	510



Gambar III.3 – Jumlah SNI menurut jenis PNPS yang telah ditetapkan di tahun 2018

Tabel III.6 – SNI menurut kelompok peruntukkan yang telah ditetapkan di tahun 2018

Kelompok peruntukkan SNI	Bidang				PPS
	KP	PPK	LS	MEK	Total
Produk	38	111	21	40	210
Sistem	11	7	27	27	72
Proses	77	42	73	32	224
Jasa	0	0	2	0	2
Personil	0	0	2	0	2
Total	126	160	125	99	510



Gambar III.4 – SNI menurut kelompok peruntukkan yang telah ditetapkan di tahun 2018

Jumlah SNI yang diabolisi pada tahun 2018, dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel III.7 – Jumlah SNI yang telah diabolisi di tahun 2018

Bidang	Jumlah Abolisi SNI
KP	80
PPK	1
LS	14
MEK	16
Total PPS	111

Dari data yang yang diberikan oleh Pusat Informasi dan Dokumentasi BSN disebutkan bahwa Jumlah SNI yang ditetapkan SNI yang sudah ditetapkan s.d Bulan Desember 2017 adalah sebanyak 9.559 SNI, sehingga apabila ditambahkan dengan 510 SNI yang ditetapkan di 2018, maka jumlah SNI saat ini adalah sebanyak 10.069 SNI, atau pencapaiannya adalah 100,09 % dari target SNI kumulatif 2018 sebesar 10.059 SNI.



Gambar III.5 – Kegiatan rapat teknis perumusan SNI

Tabel III.8 - Capaian Kinerja Sasaran II

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian %		
2. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dari Komite Teknis Perumusan SNI	750	930	124 %	1043 (208,6 % dari target 500 PNPS)	Penurunan
3. Jumlah rancangan pedoman terkait pengembangan SNI	2	2	100 %	6	N/A
4. Jumlah SNI yang dikaji ulang	400	680	170 %	656	Peningkatan

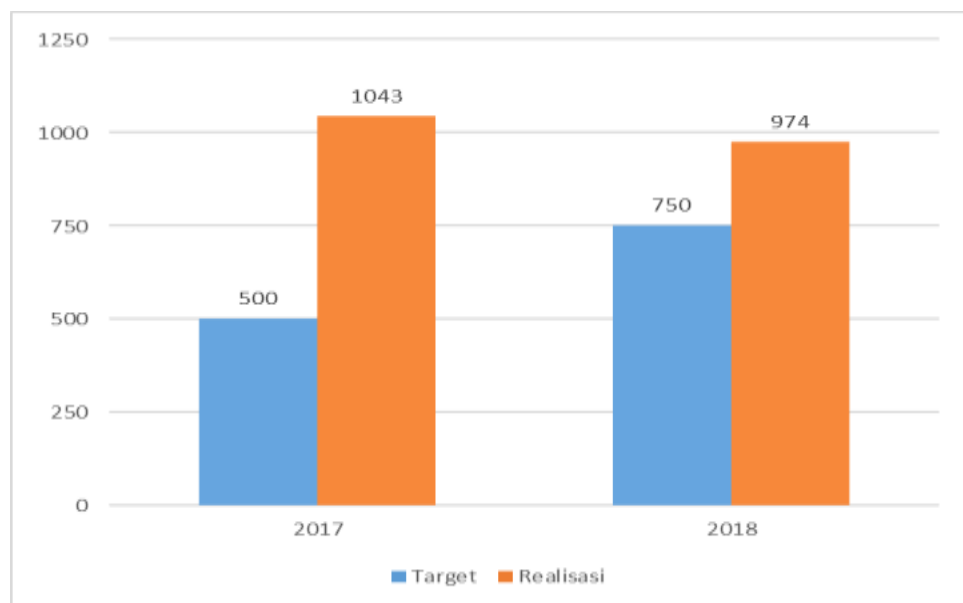
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan kebijakan dalam perumusan standar terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dari Komite Teknis Perumusan SNI, Jumlah rancangan pedoman terkait pengembangan SNI dan Jumlah SNI yang dikaji ulang. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian 90%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

2. Indikator Kinerja: Jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dari Komite Teknis Perumusan SNI

Memperhatikan sasaran tahunan, indikator dan target PPS yang ditetapkan pada tahun 2018, dari target 750 rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS), tercapai 930 rekomendasi (124%). Perbandingan target dan realisasi untuk tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada Gambar III.6, sedangkan distribusi jumlah rekomendasi PNPS untuk masing-masing bidang bidang dapat dilihat pada tabel III.5 berikut:

Tabel III.9 – Distribusi jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)

Bidang	2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
KP	125	224	130	136
PPK	125	348	250	290
LS	125	161	170	174
MEK	125	310	200	330
Total	500	1043	750	930

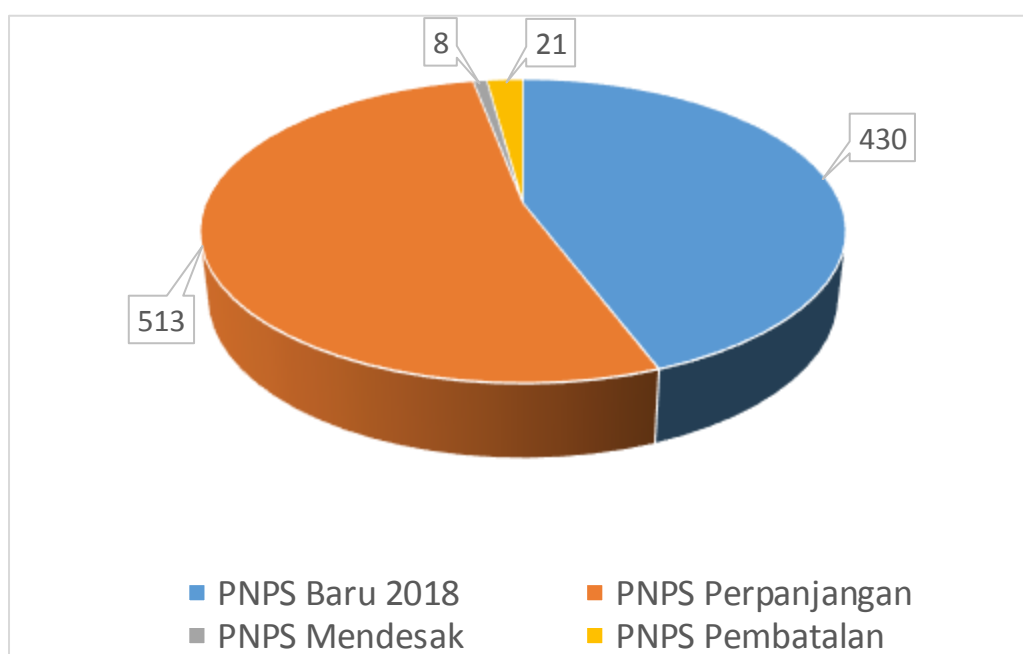


Gambar III.6 - Jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dari Komite Teknis Perumusan SNI

Sebagai bagian dari kesinambungan dan monitoring pada proses perumusan SNI di tahun selanjutnya, dilakukan pemetaan distribusi usulan PNPS berdasarkan jalur usulan di setiap bidang yang dapat dilihat pada Tabel III.10 dan Gambar III.7.

Tabel III.10 – Distribusi rekomendasi persetujuan usulan PNPS berdasarkan jalur usulan

URAIAN	Bidang				PPS TOTAL
	KP	PPK	LS	MEK	
PNPS Baru 2018	81	96	108	145	430
PNPS Perpanjangan	67	194	64	188	513
PNPS Mendesak	0	1	2	5	8
PNPS Pembatalan	12	1	0	8	21
Total	136	290	218	330	930



Gambar III.7 Jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dari Komite Teknis Perumusan SNI

Memperhatikan data-data pada tabel dan gambar diatas, dapat terlihat terjadi sedikit penurunan jumlah rekomendasi usulan PNPS dibandingkan tahun 2017, hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan MTPS untuk menjalankan amanah Undang - Undang Nomor 20 tahun 2014 terkait Standardisasi dan Penilaian kesesuaian yang dalam menetapkan usulan PNPS hanya sekali dalam satu tahun. MTPS pun telah memfasilitasi pengajuan usulan PNPS tambahan yang disetujui pada rapat MTPS di bulan April serta 8 judul usulan PNPS mendesak di tahun 2018.

Keberadaan Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SISPK) yang dapat diakses secara online melalui <http://sispk.bsn.go.id>, diharapkan dapat mempermudah komunikasi dan kerjasama sekretariat komtek (di kementerian maupun di BSN) dengan PIC Komtek di BSN sehingga proses penjangkaran PNPS dan monitoring usulan PNPS di tahun selanjutnya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

3. Indikator Kinerja: Jumlah rancangan pedoman terkait pengembangan SNI

Jumlah rancangan Pedoman terkait pengembangan SNI Dalam rangka memberikan keteraturan dan persamaan pemahaman dalam pelaksanaan perumusan SNI oleh seluruh stakeholder sesuai dengan prinsip-prinsip perumusan SNI, maka diperlukan BSN perlu menetapkan kebijakan dalam mengatur proses pengembangan SNI. Kebijakan tersebut ditetapkan BSN dalam bentuk Pedoman terkait pengembangan SNI. Melengkapi Pedoman terkait pengembangan SNI yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2018 ini target jumlah rancangan Pedoman terkait pengembangan SNI adalah sebanyak 2 Rancangan Pedoman, yaitu: 1. Pedoman Tenaga Pengendali Mutu SNI 2. Standardisasi dan Kegiatan yang Terkait – Istilah Umum Kedua Pedoman tersebut diperlukan dalam pelaksanaan perumusan SNI.

Pedoman Tenaga Pengendali Mutu SNI mengatur tentang pengelolaan Tenaga Pengendali Mutu SNI yang ditugaskan BSN pada rapat perumusan SNI, untuk mengendalikan pelaksanaan perumusan SNI sesuai dengan ketentuan. Sementara Pedoman terkait istilah umum dalam standardisasi dan kegiatan yang terkait, diperlukan oleh seluruh stakeholder perumusan SNI sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam menggunakan istilah-istilah terkait standardisasi dan kegiatan lainnya yang terkait.

Dalam perancangan pedoman tersebut, PPS melakukan beberapa kegiatannya meliputi:

- 1) Penyusunan konsep,

- 2) Pembahasan internal PPS,
- 3) Pelaksanaan Public Hearing RPSN dengan para pemangku kepentingan,
- 4) Finalisasi naskah akhir PSN untuk proses penetapan melalui Peraturan Kepala BSN.

Dengan tersusunnya 2 (dua) rancangan pedoman tersebut, maka capaian realisasi tahun 2018 untuk jumlah rancangan Pedoman terkait pengembangan SNI adalah 2 Rancangan Pedoman atau 100% dari target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 6 Rancangan Pedoman yang memenuhi target pada tahun 2017. Hal ini tidak dapat dikaitkan antara pencapaian penyusunan rancangan Pedoman tahun 2017 dan 2018 karena penyusunan rancangan Pedoman memperhatikan kebutuhan penyusunan pedoman di pengembangan SNI (Penyusunan Pedoman tahun 2018 untuk melengkapi penyusunan Pedoman tahun 2017).

4. Indikator Kinerja: Jumlah SNI yang dikaji ulang

Dalam program ini, PPS melakukan kegiatan memberikan dukungan ke Komtek untuk pemeliharaan SNI yang telah berusia lebih dari 5 tahun dengan melalui kegiatan kaji ulang SNI.

SNI perlu untuk dikaji ulang untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi; dan menilai kelayakan dan kekiniannya. Untuk menjaga keterkinian SNI, sesuai dengan praktek di internasional, kaji ulang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Dalam pelaksanaannya, perlu dilihat beberapa faktor untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi SNI tersebut, apakah SNI tersebut perlu diabolisi (jika tidak diperlukan lagi), tetap (jika masih sesuai), revisi (jika diperlukan perubahan yang cukup besar dalam substansinya), amandemen (jika hanya diperlukan sedikit perubahan substansi), serta ralat (jika terdapat kesalahan kecil misalnya kesalahan cetak). Beberapa faktor tersebut adalah: ketentuan

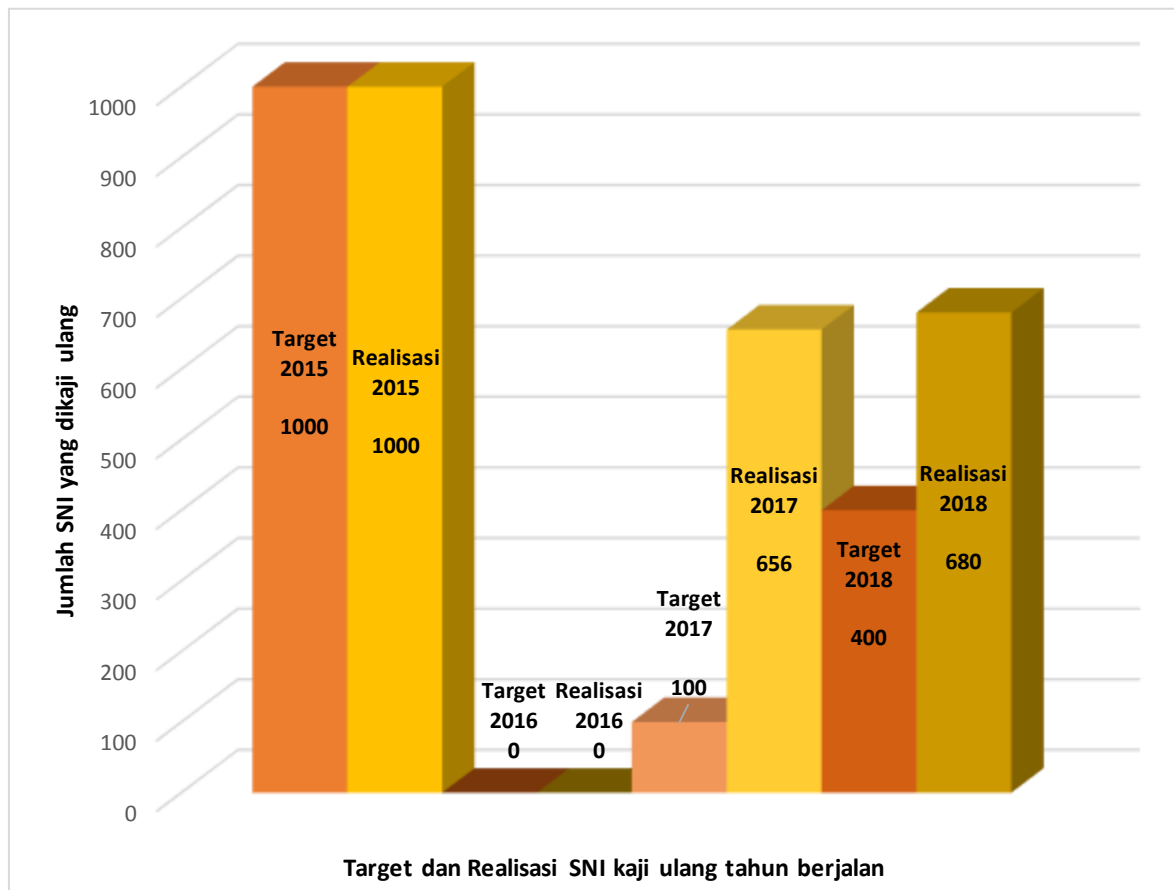
pengembangan SNI yang ada, standar internasional yang tersedia, kesepakatan kerjasama regional (ASEAN) terkait harmonisasi standar, dan *national differences* apabila diperlukan.

Pada tahun tahun 2015, BSN melaksanakan kaji ulang SNI terhadap 1.000 SNI, berbeda dengan tahun 2016 kegiatan kaji ulang ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran, sedangkan di tahun 2017 kaji ulang dilakukan terhadap 656 SNI yang berasal dari beberapa komtek. Untuk tahun 2018, BSN dapat memberikan dukungan kepada komtek untuk pemeliharaan SNI terhadap 39 komtek dan Subkomtek dengan total jumlah 680 SNI.

Tabel III.11 – Jumlah SNI Kaji Ulang Tahun 2018

No	Kode Komite Teknis	Nama Komite Teknis	Jumlah SNI yang dikaji ulang
1	01-05	Dokumentasi dan Informasi	20
2	03-02	Sistem Manajemen Mutu, Aset dan Pendidikan Non Formal	6
3	03-03	Jasa Bidang Perdagangan	3
4	03-05	Lembaga Penilaian Kesesuaian	2
5	03-10	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	1
6	07-01	Informasi Geografi dan Geomatika	2
7	13-01	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	3
8	13-03	Kualitas Lingkungan	21
9	13-05	Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara	13
10	13-06	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Mineral dan Batubara	14
11	13-07	Manajemen Lingkungan	3
12	13-08	Penanggulangan Bencana	6
13	21-01-S1	Permesinan dan Alsintan	1
14	27-03	Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	33
15	31-01	Elektronika Untuk Keperluan Rumah Tangga	18
16	33-02	Telekomunikasi	16
17	35-01	Teknologi Informasi	25
18	45-02	Prasarana Perkeretaapian	10
19	47-01	Bangunan kapal dan konstruksi kelautan	10
20	59-01	Tekstil dan Produk Tekstil	105
21	59-01-S1	Batik dan Produk Batik	1
22	59-02	Kulit, Produk Kulit dan Alas Kaki	18
23	65-01	Pengelolaan Hutan	14
24	65-05	Produk Perikanan	54
25	65-05-S1	Perikanan Tangkap	49
26	65-08	Produk Perikanan Nonpangan	14
27	65-10	Kopi dan Produk Kopi	8

No	Kode Komite Teknis	Nama Komite Teknis	Jumlah SNI yang dikaji ulang
28	65-13	Gula	7
29	67-03	Peternakan dan Produk Peternakan	10
30	67-03-S3	Metode Pengujian Peternakan	3
31	75-02	Produk Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pelumas	45
32	79-02	Uji fisik dan mekanik kayu	10
33	81-01	Industri Kaca	21
34	81-02	Industri Keramik	18
35	87-01	Industri Cat dan Warna	19
36	91-01-S3	Perumahan, Sarana dan Prasarana Permukiman	11
37	91-02	Kimia Bahan Konstruksi	10
38	97-01	Rumah Tangga, Hiburan dan Olah Raga	40
39	97-02	Furnitur berbahan kayu, rotan dan bambu	16
Total			680



Gambar III.8 – Target dan Realisasi SNI kaji ulang dari tahun 2015 - 2018

SASARAN 3

Meningkatkan pengelolaan kualitas SDM dalam perumusan standar

Tabel III.12 - Capaian Kinerja Sasaran III

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian %		
5. Jumlah Sumber Daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	550	802	133%	1061 (176,8% dari target 600 orang)	Penurunan
6. Jumlah Komtek yang memenuhi kriteria evaluasi kinerja	40	26	65%	24	Penurunan

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan pengelolaan kualitas SDM dalam perumusan standar terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Jumlah Sumber Daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya dan Jumlah Komtek yang memenuhi kriteria evaluasi kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian 99 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

5. Indikator Kinerja: Jumlah Sumber Daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya

Kegiatan ini lebih bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya internal BSN yang ada di lingkungan PPS terkait perkembangan terkini tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Namun terdapat pula kegiatan *inhouse training* untuk K/L dan Komite Teknis baru di Tahun 2018. Pada tahun 2018, sebanyak 303 orang telah mendapat peningkatan kompetensi terkait perumusan standar, dalam bentuk seminar, workshop, pelatihan, dan verifikasi proses produksi ke industri penerap SNI untuk mendapat gambaran proses produksi produk.

Peningkatan kompetensi sumberdaya perumusan standar meliputi peningkatan kompetensi sumberdaya anggota Komtek, sekretariat Komtek,

konseptor SNI dan editor SNI, melalui Workshop Pengembangan SNI, dan pemahaman terhadap Peraturan Badan Standardisasi Nasional (PBSN). Selain itu juga dilakukan peningkatan kompetensi pemangku kepentingan terhadap pemahaman terhadap PBSN. Adapun peningkatan kompetensi personel di internal BSN, khususnya di Pusat Perumusan Standar, seluruh personel telah mengikuti pelatihan. Pelatihan in-house dengan bekerjasama dengan lembaga pelatihan eksternal yang mempunyai *trainer* yang kompeten di bidangnya.

Secara keseluruhan, kegiatan pembinaan SDM perumusan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Perumusan Standar sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel III.13 di bawah ini.

Tabel III.13 - Pembinaan SDM Perumusan SNI tahun 2018

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah Peserta (orang)
Eksternal			
1.	Seminar SNI Kopi	Jakarta, Januari 2018	40
2.	Pelatihan Editor/Konseptor KKP	Semarang, Februari 2018	31
3.	Pelatihan Editor/Konseptor Pustan Kemenperin	Bogor, Maret 2018	15
4.	Pelatihan Editor Konseptor 65-05	Jakarta, Februari 2018	30
5.	Workshop SNI produk kopi dan olahannya	Surabaya, November 2018	50
6.	Workshop Bedah SNI Sistem Peringatan Dini Gerakan Tanah	Magelang dan Yogyakarta, 7-9 Mei 2018	40
7.	Workshop Peningkatan Kompetensi SDM dalam Rangka Pengembangan SNI Bidang Kimia dan Pertambangan Tahun 2018	Jakarta, 28 Agustus 2018	50
8.	Workshop Konseptor dan Editor	Jakarta	25
9.	Workshop Konseptor dan Editor	Jakarta	26

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah Peserta (orang)
10.	Workshop Pengembangan SNI Hotel	Yogyakarta	40
11.	Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Pedoman Standardisasi Nasional	Balai Irigasi Kementerian PUPR, Bekasi	30
12.	Workshop Peningkatan Pemahaman Terkait Penerapan RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) di Bidang Perkeretaapian	PT KAI (Persero) Gambir Jakarta	25
13.	Workshop Peningkatan Pemahaman Konseptor Perumus SNI	Auditorium PT KAI (Persero) Bandung	60
Internal			
1.	Workshop persamaan persepsi Pedoman Pengembangan SNI	Jakarta, Agustus dan Desember 2018	30
2.	Pelatihan perwajahan SNI (finalisasi dokumen SNI)	BSN, Jakarta, November 2018	20
3.	Pelatihan pengenalan validasi dan verifikasi metode uji	Jakarta, Desember 2018	30
4.	Pelatihan Organoleptik	Jakarta, Juni 2018	10
5.	Pelatihan Lead Auditor SNI ISO 22000, Sistem Manajemen Keamanan Pangan	Jakarta, Juli 2018	2
6.	Pelatihan Petugas Pengambilan Contoh	Jakarta, Agustus 2018	10
7.	Pelatihan Pengenalan Sistem manajemen alat kesehatan (SNI ISO 13485)	Jakarta, Agustus 2018	10
8.	Verifikasi proses produksi ke industri:		30
	- Kopi - Popok Bayi - Pendakian Gunung	- Bandung, April 2018 - Bandung, Juli 2018 - Bogor, Juli 2018	- 10 - 5 - 6

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah Peserta (orang)
	- Gula - Kopi	- Pasuruan, Oktober 2018 - Yogyakarta, November 2018	- 4 - 5
9.	Training HS Code dengan Kemendag	Jakarta, 23 Januari 2018	12
10.	Training 31000	Jakarta, 8 Agustus 2018	11
11.	Training Validasi	Jakarta, 24 April 2018	10
12.	Training Ketidakpastian Pengujian Kimia	Jakarta, 25 April 2018	10
13.	Training HS Code dengan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu	Jakarta, 24 Oktober 2018	11
14.	Training Hak Paten dengan Kemenkumham	Jakarta, 25 Oktober 2018	12
15.	Training pemahaman ISO 17065	Jakarta, 27-28 November 2018	16
16.	Training Pemahaman Standardisasi	BSN, 2 Mei 2018	25
17.	Pengenalan ISO 45001	Jakarta, 14 Mei 2018	20
18.	Training Integrated management system	Jakarta, 8 – 9 November 2018	10
19.	Awareness ISO 50001:2018	Jakarta, 3 Desember 2018	7
20.	Training Pengenalan ISO 45001	Jakarta	1
21.	Managing national standards development project and programme	Jakarta	1
22.	Training in house Integrated and Audit Management System	Jakarta	1
23.	Training OHSAS 18001	Jakarta	1
24.	Training asesor ISO 45001	Jakarta	1
25.	Workshop PTB	BSN, Jakarta	25

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah Peserta (orang)
26.	Training eksternal integrated in house training og ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 31000	Jakarta	12
27.	Magang UPT Balai Yasa Yogyakarta	UPT Balai Yasa Yogyakarta	6
28.	Magang Politeknik Negeri Bandung	Politeknik Negeri Bandung	11
29.	Magang PT PAL	PT PAL Surabaya	12
30.	Magang Laboratorium Mekanika Tanah PT KAI (Persero)	Laboratorium Mekanika Tanah PT KAI (Persero)Bandung	6
31.	Magang Laboratorium Balai Sungai Solo	Laboratorium Balai Sungai Solo	11
Total SDM			802

Dengan demikian target 600 orang sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya pada tahun 2018 yang ditetapkan oleh Pusat Perumusan Standar telah mampu mencapainya, bahkan melebihi target sebesar 133 % (802 orang). Hal ini terjadi karena terdapat beberapa in house training salah satunya difasilitasi oleh K/L terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT KAI (Persero).

6. Indikator Kinerja: Jumlah Komtek yang memenuhi kriteria evaluasi kinerja

Dalam proses perumusan SNI, Komite Teknis Perumusan SNI merupakan kepanjangan tangan BSN, yang pengelolaan kesekretariatannya ditangani oleh beberapa K/L. Oleh karena itu telah menjadi tanggung jawab BSN untuk membina sekretariat Komite Teknis tersebut.

Pemeliharaan Komite Teknis dilakukan melalui evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang *Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia*. Evaluasi ini

dilakukan secara rutin setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar PPS dalam memperbaiki pengelolaan Komite Teknis, baik yang berada di PPS maupun di Kementerian/Lembaga lain.

Pembinaan Komite Teknis Perumusan SNI agar memenuhi ketentuan dalam pengembangan SNI, dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi kinerja, yang berbasis pada ketentuan Pedoman tentang Pengelolaan Komite Teknis dan Subkomite Teknis. Evaluasi ini dilakukan secara rutin setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar perbaikan pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI. Hasil evaluasi kinerja ini juga digunakan sebagai dasar penentuan dalam penganugerahan Herudi Technical Committee Award (HTCA) yang akan diberikan kepada Komite Teknis Perumusan SNI.

Evaluasi penilaian kinerja Komite Teknis Perumusan SNI tahun 2018 menggunakan kriteria berikut ini:

1. Kriteria Pertama: Pengelolaan sekretariat komite teknis,

Kriteria ini ditujukan untuk melihat pengelolaan sekretariat Komite Teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas Komite Teknis. Penilaian dilakukan berdasarkan pemeliharaan dokumentasi dasar hukum organisasi, kualifikasi SDM, perumusan SNI berdasarkan PNPS tahun 2017, dan kaji ulang SNI.

2. Kriteria kedua: Pengelolaan PNPS

Kriteria ini ditujukan untuk melihat keaktifan Komite Teknis dalam melaksanakan perumusan SNI berdasarkan PNPS 2017. Penilaian dilakukan berdasarkan sejauh mana tahapan perumusan SNI sudah dilakukan oleh Komite Teknis dan waktu pelaksanaan perumusan SNI sejak PNPS 2017 ditetapkan.

3. Kriteria Ketiga: pemeliharaan SNI.

Kriteria ini ditujukan untuk melihat keaktifan Komite Teknis dalam melaksanakan salah satu tugasnya untuk memelihara SNI. Penilaian dilakukan berdasarkan jumlah SNI yang dikaji ulang dari target SNI yang harus dikaji ulang, serta tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan hasil kaji ulang tersebut.

Tabel III.14 – Kriteria evaluasi kinerja komite teknis perumusan SNI tahun 2018

No.	Kriteria Evkin	Bobot (%)
1	Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI	45
2	Pengelolaan PNPS 2017	25
3	Pemeliharaan SNI	30
Total		100

Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi kinerja Komite Teknis Perumusan SNI tersebut, ada 151 Komite teknis/subkomite teknis yang dievaluasi kinerjanya pada tahun 2018. Hasil lengkap nilai hasil pelaksanaan evaluasi kinerja Komtek/Sub Komtek tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.15 - Hasil scoring pelaksanaan evaluasi kinerja Komtek/Sub Komtek tahun 2018

No	Scoring (%)	Komtek/Sub Komtek yang dievaluasi kinerjanya				PPS	Keterangan
		Bidang KP	Bidang PPK	Bidang MEK	Bidang LS		
1	> 70	2	2	0	1	5	Ada 26 Komite teknis/subkomite teknis nilai >40 %
2	60 - 70	1	0	0	0	1	
3	50 - 60	1	4	2	3	10	
4	40 - 50	1	4	1	4	10	
5	30 - 40	3	4	10	5	22	
6	20 - 30	2	11	8	1	22	
7	10 - 20	1	3	3	0	7	
8	1 - 10	0	0	0	0	0	
9	0	13	21	21	19	74	
Total		24	49	45	33	151	

Pada tabel tersebut diatas, dari 151 Komite Teknis/Subkomite teknis di Pusat Perumusan Standar, yang mendapat nilai hasil evaluasi > 40 % (*passing grade*) ada 26 Komite Teknis/Subkomite teknis. Dengan demikian, capaian realisasi untuk Jumlah Komtek yang memenuhi kriteria evaluasi kinerja adalah 26 Komite Teknis atau 65 % dari target yang ditetapkan, yaitu 40 Komite Teknis. Capaian ini meningkat segi jumlah komite teknis/subkomite teknis dari capaian tahun 2017 yaitu sebanyak 24 Komite Teknis yang mendapat nilai hasil evaluasi > 40 %.

Sehingga ada peningkatan jumlah komite teknis yang mencapai penilaian evaluasi kinerja >40 % dari 24 Komite teknis/Subkomite teknis menjadi 26 Komite Teknis/Subkomite teknis.

Pada tahun 2017, ada 24 Komite teknis dari target 60 Komite teknis, atau pencapaian target persentase 2017 adalah 40 persen, sehingga, ada peningkatan persentase dari 2017 sebesar 40 persen menjadi tahun 2018 sebesar 65%.

Berikut daftar Komite Teknis/Subkomite Teknis yang penilaian evaluasi kinerjanya diatas 40 %, sebagai berikut:

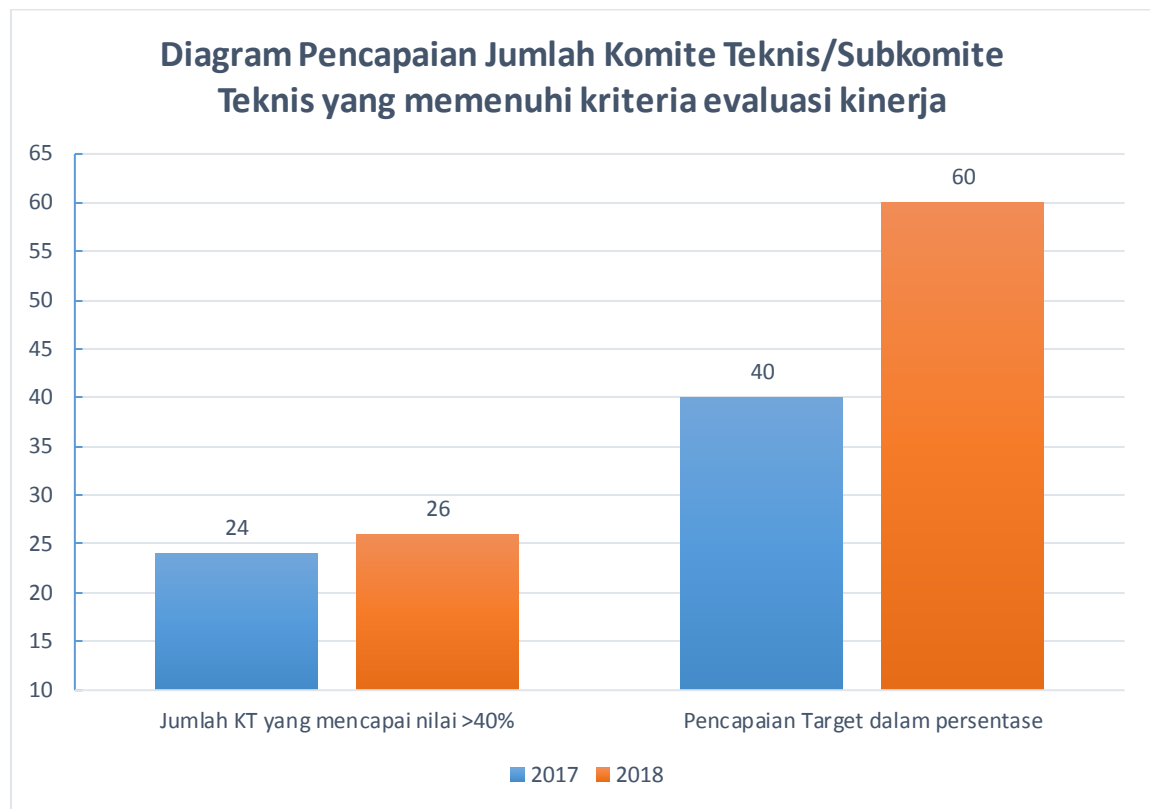
Tabel III.16 - Hasil scoring Komtek/Sub Komtek tahun 2018 > 40 %

No	Nomor KT/SKT	Nama KT/SKT	Bidang	Sekretariat
1	01-05	Dokumentasi dan Informasi	LS	LIPI
2	03-03	Jasa Bidang Perdagangan	LS	Kementerian Perdagangan
3	03-05	Lembaga Penilaian Kesesuaian	LS	BSN
4	03-10	Manajemen resiko	LS	BSN
5	07-01	Informasi Geografi/Geomatika	KP	BIG
6	11-04	In vitro diagnostic	PPK	Kementerian Kesehatan
7	11-09	Peralatan Kesehatan Non Elektromedik	PPK	Kementerian Kesehatan
8	11-10	Sistem Manajemen Peralatan Kesehatan	PPK	BSN
9	13-03	Kualitas Lingkungan	LS	Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan
10	13-06	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Geologi dan Pertambangan	KP	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11	13-07	Manajemen Lingkungan	LS	Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan
12	27-03	Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	MEK	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
13	37-01	Teknologi grafika	LS	BSN
14	59-01	Tekstil dan Produk Tekstil	LS	Kementerian Perindustrian
15	65-01	Pengelolaan Hutan	PPK	Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan
16	65-02	Hasil Hutan bukan Kayu	PPK	Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan

No	Nomor KT/SKT	Nama KT/SKT	Bidang	Sekretariat
17	65-05	Produk Perikanan	PPK	Kementerian Kelautan dan Perikanan
18	65-08	Produk Perikanan Nonkonsumsi	PPK	Kementerian Kelautan dan Perikanan
19	65-11	Tanaman pangan	PPK	Kementerian Pertanian
20	67-08	Sistem Manajemen Keamanan Pangan	PPK	BSN
21	73-01	Komoditas Tambang Mineral, Batubara, dan Panasbumi	KP	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
22	75-02	Produk Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pelumas	KP	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
23	79-01	Hasil hutan Kayu	PPK	Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan
24	85-01	Teknologi Kertas	KP	Kementerian Perindustrian
25	91-01-S3	Perumahan, Sarana dan Prasarana Permukiman	MEK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26	91-01-S4	Bahan, Sains, Struktur dan Konstruksi Bangunan	MEK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk Komtek yang nilai scoringnya di bawah 10 % disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada pengajuan PNPS oleh Komtek pada tahun 2018, sehingga tidak ada kegiatan proses perumusan SNI.
2. Komtek yang baru dibentuk pada tahun 2018, sehingga belum ada SNI yang dihasilkan/proses perumusan SNI masih berjalan.
3. Adanya perubahan nomenklatur unit kerja di beberapa K/L, sehingga terjadi kevakuman pengelolaan sekretariat Komtek.
4. Kegiatan proses perumusan SNI telah berjalan sesuai tahapan namun pencapaian hingga tahap SNI belum dapat diselesaikan tepat waktu.



Gambar III.9 – Pencapaian target jumlah komite teknis/subkomite teknis yang memenuhi kriteria evaluasi kinerja Tahun 2017 - 2018

Dari 26 Komite Teknis/Subkomite Teknis yang memenuhi nilai passing grade, nilai tertinggi untuk kriteria 1 Pengelolaan Komite Teknis adalah Komtek 73-01 Komoditas Pertambangan Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba, KESDM); sedangkan tertinggi di kriteria 2. Penyelesaian PNPS adalah Komtek 65-05 Produk Perikanan (Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, KKP) dan nilai tertinggi untuk kriteria 3. Pemeliharaan SNI adalah Komtek 85-01 Teknologi Kertas (Pustan, Kemenperin).

Sementara itu nilai rata-rata keseluruhan kriteria yang mempunyai nilai total tertinggi dan sekaligus sebagai Penerima HTCA tahun 2018, adalah Komtek 65-05 Produk Perikanan (Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, KKP), yang juga merupakan penerima HTCA tiga tahun berturut-turut sebelumnya.



Gambar III.10 – Penerima penghargaan herudi technical committee award 2018 untuk Komite Teknis/Subkomite Teknis yang meraih nilai tertinggi dalam evaluasi kinerja 2018

SASARAN 4

Meningkatkan pengelolaan layanan dalam penetapan SNI

Tabel III.17 - Capaian Kinerja Sasaran IV

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian %		
7. % Penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu	25 %	23.38 %	93,52 %	N/A	N/A
8. Jumlah kumulatif Sekretariat Komtek Perumusan SNI	38	37	97,36 %	34	Peningkatan

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian %		
yang dikelola oleh BSN					

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan pengelolaan layanan dalam penetapan SNI terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu dan Jumlah kumulatif Sekretariat Komtek Perumusan SNI yang dikelola oleh BSN. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja.

7. % Penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu

Sesuai dengan Pedoman Pengembangan SNI, perkiraan waktu perumusan SNI dilaksanakan dalam waktu 13 bulan sejak penetapan PNPS. Pelaksanaan perumusan SNI sesuai kurun waktu tersebut menunjukkan kesiapan Komite Teknis dan BSN dalam melakukan pengelolaan layanan penetapan SNI.

Persentase Penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel III.18 - Persentase Penyelesaian PNPS hingga RASNI Tepat Waktu

Bidang	PNPS Baru 2018	RASNI tepat waktu	Persentase Capaian
Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi	145	20	13.79 %
Lingkungan dan Serbaneka	110	17	15 %
Kimia Pertambangan	81	33	40.74 %
Pertanian, Pangan, dan Kesehatan	96	31	32 %
Total	427	101	23.65%

Dengan demikian, capaian realisasi untuk "Persentase penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu" adalah 23.38 % atau 93.52 % dari target yang

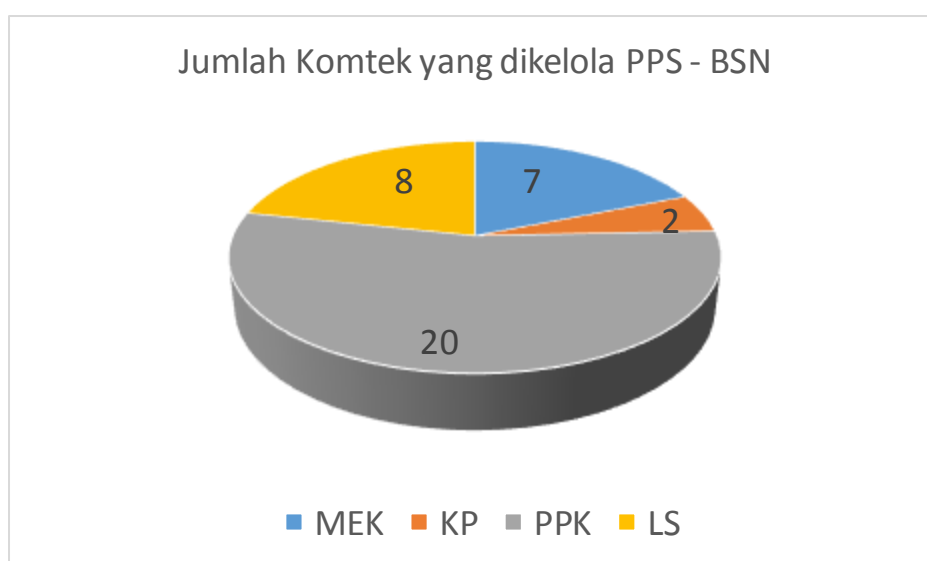
ditetapkan, yaitu 25 %. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena tidak adanya indikator tersebut di tahun sebelumnya.

8. Indikator Kinerja: Jumlah kumulatif Sekretariat Komtek Perumusan SNI yang dikelola oleh BSN

Dari 152 Komtek yang ada pada tahun 2018, ada 37 Komtek yang dikelola oleh BSN. Distribusi Komtek pada masing – masing bidang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.19 – Pengelolaan sekretariat Komtek di PPS - BSN

No.	Bidang	Jumlah Komtek yang dikelola PPS - BSN
1	MEK	7
2	KP	2
3	PPK	20
4	LS	8
Jumlah		37



Gambar III.11 - Pengelolaan sekretariat Komtek di PPS – BSN

Secara lebih lengkap 37 (tiga puluh tujuh) Sekretariat Komtek/Sub Komtek yang dikelola oleh PPS-BSN dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini:

Tabel III.20 – Sekretariat Komtek/SubKomtek Perumusan SNI yang dikelola oleh PPS

No	Komtek/SubKomtek	Nama Komtek	Sekretariat Pengelola Komtek
1.	03-02	Sistem Manajemen Mutu	Bidang LS - PPS
2.	03-05	Lembaga penilaian kesesuaian	Bidang LS - PPS
3.	03-06	Tanggung Jawab Sosial	Bidang LS - PPS
4.	03-08	Halal	Bidang PPK - PPS
5.	03-09	Manajemen pariwisata	Bidang LS - PPS
6.	03-10	Manajemen risiko	Bidang LS - PPS
7.	07-03	Nanoteknologi	Bidang LS - PPS
8.	11-06	Kontrasepsi	Bidang PPK - PPS
9.	11-07	Produk Optik dan Fotonik	Bidang PPK - PPS
10.	11-08	Prasarana Laboratorium Biologi dan Kimia	Bidang PPK - PPS
11.	11-10	Sistem Manajemen Peralatan Kesehatan	Bidang PPK - PPS
12.	11-11	Produk Higiene Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Bidang PPK - PPS
13.	11-12	Kedokteran gigi	Bidang PPK - PPS
14.	11-13	Sterilisasi Produk Pelayanan Kesehatan	Bidang PPK - PPS
15.	13-04	Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran	Bidang MEK - PPS
16.	13-08	Penanggulangan bencana	Bidang KP - PPS
17.	13-09	<i>Bio Security Level- BSL</i>	Bidang PPK - PPS
18.	13-10	Unit Pengolah Air Minum	Bidang PPK - PPS
19.	17-04	Standar dasar	Bidang LS - PPS
20.	19-04	Metode dan pengujian secara umum	Bidang PPK - PPS
21.	19-06	Metode dan pengujian umum, khusus kimia pangan	Bidang PPK - PPS
22.	27-07	Sistem Refrigerant	Bidang MEK - PPS
23.	37-01	Teknologi Grafika	Bidang LS - PPS
24.	43-02	Kendaraan jalan raya bertenaga listrik	Bidang MEK - PPS
25.	45-01	Sarana Perkeretaapian	Bidang MEK - PPS

No	Komtek/SubKomtek	Nama Komtek	Sekretariat Pengelola Komtek
26.	45-02	Prasarana Perkeretaapian	Bidang MEK - PPS
27.	65-03	Pertanian	Bidang PPK - PPS
28.	65-09	Kakao dan Produk Kakao	Bidang PPK - PPS
29.	65-10	Kopi dan Produk Kopi	Bidang PPK - PPS
30.	67-06	Bioteknologi	Bidang PPK - PPS
31.	67-07	Analisis sensori	Bidang PPK - PPS
32.	67-08	Sistem Manajemen Keamanan Pangan	Bidang PPK - PPS
33.	71-05	Minyak Atsiri	Bidang KP - PPS
34.	79-02	Uji fisik dan mekanik kayu	Bidang MEK - PPS
35.	13-11	Kota Cerdas dan Berkelanjutan	Bidang MEK - PPS
36.	19-07	Metode Pengujian Halal	Bidang PPK - PPS
37.	19-05	Metode dan Pengujian Umum Mikrobiologi	Bidang PPK - PPS

SASARAN 5

Meningkatkan harmonisasi RSNi dengan standar internasional

Tabel III.21 - Capaian Kinerja Sasaran IV

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian %		
9. Jumlah RSNi adopsi standar internasional	186	229	123%	-	N/A

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran: Meningkatkan harmonisasi RSNi dengan standar internasional terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah RSNi adopsi standar internasional. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 123%.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5, sebagai berikut:

9. Jumlah RSNI adopsi standar internasional

RSNI adopsi internasional merupakan salah satu jalur perumusan SNI yang dapat digunakan. RSNI yang merupakan adopsi internasional dapat mengadopsi ke beberapa Standar Internasional seperti ISO, IEC, ASTM, ASME, dan sebagainya yang sudah bekerjasama dengan BSN.

Tabel III.22 - Target dan realisasi jumlah RSNI adopsi standar internasional

No	Bidang	Target	Realisasi	Capaian
1	MEK	60	59	98,3 %
2	KP	31	59	190 %
3	LS	45	53	117 %
4	PPK	50	58	116 %
Jumlah		186	229	123 %

Dari data pada tabel III.19 tersebut, jumlah RSNI Adopsi internasional yang ditetapkan di tahun 2018, ada 229 RSNI dari target 186 RSNI, atau pencapaiannya sebesar 123 % dari target yang ditetapkan.

SASARAN 6

Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di PPS

Tabel III.23 - Capaian Kinerja Sasaran VI

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian %		
10. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)	83	87,22	105,08 %	71.79	Peningkatan
11. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)	70	73,43	104,90 %	N/A	N/A

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di PPS terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja

yaitu Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB) dan Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN).

10. Indikator Kinerja: Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)

Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 ditargetkan mendapat nilai 83 dari Kemenpan RB. Capaian Kinerja Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB) yaitu 87.22 (105,08 %). Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 71.79 (89.74 %)

11. Indikator Kinerja: Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN) pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 70. Capaian kinerja Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja yang diperoleh yaitu 73,43 (104,90 %).

SASARAN 7

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di PPS

Tabel III.24 - Capaian Kinerja Sasaran VII

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan / (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian %		
12. % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	100%	100%	100%	100 %	

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di PPS terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi. Capaian kinerja untuk

indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 7.

12. Indikator Kinerja: % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi

Dalam rangka pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pusat Perumusan Standar (PPS) pada tahun 2018 melakukan pelatihan serta training peningkatan kompetensi ASN yang di koordinir masing-masing bidang di PPS.

Tabel III.25 - Pelatihan dan training peningkatan kompetensi ASN di PPS

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah Peserta (orang)
1.	Workshop persamaan persepsi Pedoman Pengembangan SNI	Jakarta, Agustus dan Desember 2018	30
2.	Pelatihan perwajahan SNI (finalisasi dokumen SNI)	Jakarta, November 2018	20
3.	Pelatihan pengenalan validasi dan verifikasi metode uji	Jakarta, Desember 2018	30
4.	Pelatihan Organoleptik	Jakarta, Juni 2018	10
5.	Pelatihan Lead Auditor SNI ISO 22000, Sistem Manajemen Keamanan Pangan	Jakarta, Juli 2018	2
6.	Pelatihan Petugas Pengambilan Contoh	Jakarta, Agustus 2018	10
7.	Pelatihan Pengenalan Sistem manajemen alat kesehatan (SNI ISO 13485)	Jakarta, Agustus 2018	10
8.	Verifikasi proses produksi ke industri:		30
	- Kopi	- Bandung, April 2018	- 10
	- Popok Bayi	- Bandung, Juli 2018	- 5
	- Pendakian Gunung	- Bogor, Juli 2018	- 6
	- Gula	- Pasuruan, Oktober 2018	- 4
	- Kopi	- Yogyakarta, November 2018	- 5

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah Peserta (orang)
9.	Training HS Code dengan Kemendag	BSN, 23 Januari 2018	12
10.	Training 31000	BSN, 8 Agustus 2018	11
11.	Training Validasi	Jakarta, 24 April 2018	10
12.	Training Ketidakpastian Pengujian Kimia	Jakarta, 25 April 2018	10
13.	Training HS Code dengan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu	Jakarta, 24 Oktober 2018	11
14.	Training Hak Paten dengan Kemenkumham	Jakarta, 25 Oktober 2018	12
15.	Training pemahaman ISO 17065	Jakarta, 27-28 November 2018	16
16.	Training Pemahaman Standardisasi	BSN, 2 Mei 2018	25
17.	Pengenalan ISO 45001	Jakarta, 14 Mei 2018	20
18.	<i>Training Integrated management system</i>	Jakarta, 8 – 9 November 2018	10
19.	<i>Awareness ISO 50001:2018</i>	Jakarta, 3 Desember 2018	7
20.	Training Pengenalan ISO 45001	Jakarta	1
21.	<i>Managing national standards development project and programme</i>	Jakarta	1
22.	<i>Training in house Integrated and Audit Management System</i>	Jakarta	1
23.	Training OHSAS 18001	Jakarta	1
24.	Training asesor ISO 45001	Jakarta	1
25.	Workshop PTB	BSN, Jakarta	25
26.	Training eksternal integrated in house training og ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 31000	Jakarta	12

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah Peserta (orang)
27.	Magang UPT Balai Yasa Yogyakarta	UPT Balai Yasa Yogyakarta	6
28.	Magang Politeknik Negeri Bandung	Politeknik Negeri Bandung	11
29.	Magang PT PAL	PT PAL Surabaya	12
30.	Magang Laboratorium Mekanika Tanah PT KAI (Persero)	Laboratorium Mekanika Tanah PT KAI (Persero) Bandung	6
31.	Magang Laboratorium Balai Sungai Solo	Laboratorium Balai Sungai Solo	11
	Total SDM		802

SASARAN 8

Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di PPS

Tabel III.26 - Capaian Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Capaian 2018		
	Target	Realisasi	Capaian %
13. % Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN	100%	100%	100%
14. % Pemanfaatan BMN	100%	100%	100%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di PPS terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu % Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN dan % Pemanfaatan BMN. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 8.

13. Indikator Kinerja: % Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN

% Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 100 %. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut yaitu sebesar 100 %.

14. Indikator Kinerja: % Pemanfaatan BMN

Persentase pemanfaatan BMN pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 100%. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut yaitu sebesar 100%.

SASARAN 9

Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di PPS

Tabel III.27 - Capaian Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Realisasi 2017	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian		
15. % Realisasi Anggaran	≥ 95 %	98,03 %	103,18 %	-	

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di PPS terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase Realisasi Anggaran. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 103,18 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 9.

15. Indikator Kinerja: persentase Realisasi Anggaran PPS

Sebagai bagian dari unit kerja di Kedeputusan PKS, maka pada awal tahun 2018 PPS mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 10.840.128.000,- untuk membiayai 5 (lima) kegiatan utama. Dari pagu yang diberikan tersebut, dalam perjalanannya mengalami revisi/pemotongan pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan karena adanya perubahan skala prioritas pengalokasian

kebutuhan anggaran yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,- untuk mendukung kegiatan Bulan Mutu Nasional bulan Oktober di Surabaya dan Rp. 245.000.000,- dialihkan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi dalam rangka mendukung riset. Jadi total sisa anggaran PPS sebesar Rp. 8.595.128.000,- Dari pagu anggaran yang diberikan, PPS mampu merealisasikan penyerapan anggaran melebihi target 95 % yaitu sebesar 98,03 %. Adapun rincian masing-masing kegiatan menurut output yang ada di PPS serta perbandingan realisasi anggaran dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel III.28 - Realisasi Anggaran PPS tahun 2017 berdasarkan output anggaran

Output	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Persen Realisasi
051	Rp 1.770.065.000	Rp 1.672.217.313	Rp 97.847.687	94,47 %
052	Rp 1.557.400.000	Rp 1.513.936.843	Rp 43.463.157	97,21%
053	Rp 1.566.094.000	Rp 1.525.664.392	Rp 40.429.608	97,42 %
054	Rp 1.527.095.000	Rp 1.491.070.694	Rp 36.024.306	97,64 %
055	Rp 1.514.394.000	Rp 1.495.170.151	Rp 19.223.849	98,73 %
Total	Rp 7.935.048.000	Rp 7.698.059.393	Rp 236.988.607	97,01 %

Keterangan:
051 Menyusun Rekomendasi Kebijakan Perumusan Standar Nasional Inonesia
052 Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi
053 Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Lingkungan dan Serbaneka
054 Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Kimia dan Pertambangan
055 Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan

Tabel III.29 - Realisasi Anggaran PPS tahun 2018 berdasarkan output anggaran

Output	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Persen Realisasi
051	Rp 2.030.511.000	Rp 1.981.185.330	Rp 49.325.670	97,57 %
052	Rp 1.572.153.000	Rp 1.556.895.103	Rp 15.257.897	99,03 %
053	Rp 1.660.335.000	Rp 1.633.343.741	Rp 26.991.259	98,37 %
054	Rp 1.448.038.000	Rp 1.391.692.725	Rp 56.345.275	96,11 %
055	Rp 1.884.091.000	Rp 1.862.433.206	Rp 21.657.794	98,85 %
Total	Rp 8.595.128.000	Rp 8.425.550.105	Rp 169.577.895	98,03 %

Keterangan:
051 Menyusun Rekomendasi Kebijakan Perumusan Standar Nasional Inonesia

052 Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi
053 Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Lingkungan dan Serbaneka
054 Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Kimia dan Pertambangan
055 Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan

Tabel III.30 - Perbandingan Realisasi Anggaran PPS di tahun 2017 dan 2018

Tahun	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Persen Realisasi
2017	Rp 7.935.048.000	Rp 7.698.059.393	Rp 236.988.607	97,01%
2018	Rp 8.595.128.000	Rp 8.425.550.105	Rp 169.577.895	98,03 %

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 15 Oktober 2017, pagu anggaran Pusat Perumusan Standar adalah sebesar Rp 10.840.128.000,- dan setelah mengalami pemotongan/pengalihan anggaran menjadi total Rp. 8.595.128.000,- maka realisasi anggaran Pusat Perumusan Standar TA 2018 adalah sebesar Rp 8.425.550.105 sebesar 98,03 %. Pagu dan realisasi anggaran Pusat Perumusan Standar TA 2018 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.31 - Pagu dan Realisasi Anggaran
Pusat Perumusan Standar TA 2018**

Dalam rupiah

Kode	Output/Komponen	2018		%
		Pagu	Realisasi	
051	Menyusun Rekomendasi Kebijakan Perumusan Standar Nasional Inonesia	2.030.511.000	1.981.185.330	97,57 %
052	Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Mekanika, Elektronika Dan Konstruksi	1.572.153.000	1.556.895.103	99,03 %
053	Menyusun Standar Nasional Indonesia Bidang Lingkungan Dan Serbaneka	1.660.335.000	1.633.343.741	98,37 %
054	Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia	1.448.038.000	1.391.692.725	96,11 %

Kode	Output/Komponen	2018		%
		Pagu	Realisasi	
	Bidang Kimia Dan Pertambangan			
055	Menyusun Standar Nasional Indonesia Bidang Pertanian, Pangan Dan Kesehatan	1.884.091.000	1.862.433.206	98,85 %
	Jumlah	8.595.128.000	8.425.550.105	98,03 %

Laporan Kinerja Pusat Perumusan Standar Tahun 2018 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Pusat Perumusan Standar Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Perumusan Standar

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Pusat Perumusan Standar Tahun 2018, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Pusat Perumusan Standar Tahun 2018, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja tahun 2018.

Perbandingan antara target dan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel IV.1 di bawah ini.

Tabel IV.1 - Pencapaian Kinerja Pusat Perumusan Standar Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Stakeholder Perspectives					
1) Meningkatkan pengelolaan standardisasi	1. Jumlah SNI yang ditetapkan	SNI	10059	10069	100,09 %
Internal Process Perspectives					
2) Meningkatkan kebijakan dalam perumusan standar	2. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dari Komite Teknis Perumusan SNI	Rekomendasi	750	930	124 %
	3. Jumlah rancangan pedoman terkait pengembangan SNI	Rancangan	2	2	100 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	4. Jumlah SNI yang dikaji ulang	SNI	400	680	170 %
3) Meningkatkan pengelolaan kualitas SDM dalam perumusan standar	5. Jumlah Sumber Daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	Orang	550	802	133 %
	6. Jumlah Komtek yang memenuhi kriteria evaluasi kinerja	Komtek	40	26	65 %
4) Meningkatkan pengelolaan layanan dalam penetapan SNI	7. % penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu	%	25%	23.38%	93.52 %
	8. Jumlah kumulatif Sekretariat Komtek Perumusan SNI yang dikelola oleh BSN	Sekretariat	38	37	97.36 %
5) Meningkatkan harmonisasi RSNI dengan standar internasional	9. Jumlah RSNI adopsi standar internasional	RSNI	186	229	123 %
Learning and Growth Perspectives					
6) Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di PPS.	10. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)	nilai	83	87,22	105,08 %
	11. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)	nilai	70	73,43	104,90 %
7) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di PPS	12. % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	%	100 %	100 %	100 %
8) Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana	13. % Ketersediaan seraana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN	%	100 %	100 %	100 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
penunjang kinerja di PPS	14. % Pemanfaatan BMN	%	100 %	100 %	100 %
9) Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di PPS	15. % Realisasi Anggaran	%	≥95	98,03	103,19%

Meskipun demikian, sebenarnya masih ada beberapa sub kegiatan yang masih perlu diperhatikan dan dilakukan evaluasi kembali secara matang untuk maksud perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang karena capaiannya yang masih dibawah target, yaitu:

- (1) Pencapaian target jumlah sekretariat Komtek Perumusan SNI yang dikelola oleh BSN masih belum tercapai (97.36 %), sehingga ke depan perlu adanya koordinasi dan pendekatan kepada instansi pengelola sekretariat Komtek yang berpotensi untuk dialihkan ke BSN;
- (2) Pencapaian target 40 Komtek/Sub Komtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja pada tahun 2018 belum terpenuhi (65 %) sehingga perlu penguatan koordinasi dan pembinaan dengan Sekretariat pengelola Komtek/Sub Komtek yang saat ini tersebar di berbagai K/L;
- (3) Pencapaian target % penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu pada tahun 2018 belum terpenuhi 94.61 % sehingga perlu penguatan atas pemahaman PBSN terkait pengembangan SNI dan perlunya penguatan pengendalian proses perumusan sesuai dengan jalur PNPS yang diajukan agar lebih tepat waktu di masa datang.

Memperhatikan realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan kepada unit PPS tahun 2018 dan kendala serta peluang perbaikan yang masih terbuka lebar, maka untuk maksud perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

- (1). Penguatan pembinaan dan pendampingan kepada Sekretariat Komtek/Sub Komtek dalam memahami ketentuan yang terdapat dalam

PBSN pengembangan SNI yang harus dipenuhi, misalnya melalui audiensi, workshop in-house ke sekretariat Komtek/Sub Komtek, penguatan reminder, koordinasi intensif dan penyelenggaraan workshop pengelolaan Komtek sebagai media *benchmarking* antar sekretariat Komtek.

- (2). Penguatan pengaturan kelembagaan antar K/L terkait pengelolaan kegiatan standardisasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20/2014, agar terdapat unit kerja di K/L yang mempunyai tupoksi spesifik terkait standardisasi, termasuk salah satunya tanggung jawab untuk pengelolaan Sekretariat Komtek/Sub Komtek yang ada di lingkup K/L tersebut.
- (3). Penguatan perencanaan kegiatan dan penetapan target yang realistis, untuk menghindari target yang tidak mungkin dicapai, misalnya keadaan dimana pada saat evaluasi kinerja dilakukan masih ada Komtek/Sub Komtek yang baru saja terbentuk (kurang dari satu tahun) dan belum ada aktifitas perumusan SNI, sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi kinerja.
- (4). Penguatan perencanaan pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan agar target realisasi anggaran dapat ditingkatkan dari capaian sebelumnya.

**LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PUSAT PERUMUSAN STANDAR**



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Konny Sagala
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Perumusan Standar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Nyoman Supriyatna
Jabatan : Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

I Nyoman Supriyatna

Jakarta, Maret 2018

Pihak Pertama

Konny Sagala



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PUSAT PERUMUSAN STANDAR
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Stakeholder Perspectives		
1 Meningkatkan pengelolaan standarisasi	1 Jumlah SNI yang ditetapkan	10059 SNI
Internal Process Perspectives		
2 Meningkatkan kebijakan dalam perumusan standar	2 Jumlah rekomendasi persetujuan usulan PNPS dari Komite Teknis Perumusan SNI	750 rekomendasi
	3 Jumlah rancangan pedoman terkait pengembangan SNI	2 rancangan
	4 Jumlah SNI yang di kaji ulang	400 SNI
3 Meningkatkan pengelolaan kualitas SDM dalam perumusan standar	5 Jumlah Sumber Daya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	350 orang
	6 Jumlah Komtek yang memenuhi kriteria evaluasi kinerja	40 komtek
4 Meningkatkan pengelolaan layanan dalam penetapan SNI	7 % penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu	25 %
	8 Jumlah kumulatif Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN	38 Sekretariat Komtek
5 Meningkatkan harmonisasi RSNI dengan standar internasional	9 Jumlah RSNI adopsi standar internasional	186 RSNI
Learning and Growth Perspectives		
6 Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di PPS	10 Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai MPREB)	83 nilai
	11 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)	70 (BB) nilai
7 Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di PPS	12 % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi	100 %



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8 Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di PPS	13 % Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN	100 %
	14 % Pemanfaatan BMN	100 %
9 Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di PPS	15 % Realisasi Anggaran	≥95 %

1 Perumusan Standar	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		10,840,128,000

Pihak Kedua

I Nyoman Supriyatna

Jakarta, Maret 2018
Pihak Pertama

Konny Sagala